



POLITIK ISLAM MASA ORDE BARU DAN MASA REFORMASI

Abd. Adim¹, Ahmadi Hasan², Masyithah Umar³, Nuril Khasyi'in⁴

^{1,2,3,4}Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin

e-mail: abduladim0502@gmail.com¹, ahmadihasan58@yahoo.com², masyithah.umar55@gmail.com³, khasyiin2015@gmail.com⁴

Received 02-05-2024 | Revised 25-05-2024 | Accepted 14-06-2024

Abstract

This research discusses the correlation between Islamic politics during the New Order and Reformation era, how the Islamic movement influenced politics in Indonesia, and how these two political concepts influenced each other and contributed to the development and growth of the country even though there was political upheaval during the transition period from the New Order to the Reformation era. Islam first taught politics as a scientific discipline with the science of *siyasah* which consists of political concepts and principles in Islam such as *Siyasah Dusturiyyah*, *Siyasah Dauliyyah*, *Siyasah Maliyyah*, *Siyasah Amiriyah*, *Siyasah Khalifah*, and *Siyasah Imamah*. In general, Islamic politics has a very large movement, but when it was faced with government politics, Islamic politics is not able to dominate movements on the political stage in Indonesia. However, some of the Islamic values can be embedded in the development of the country, even on a small scale as a reflection that the majority of the population is Muslim. Muslim who has always been involved in politics in Indonesia from time to time.

Keywords: *Politics, Islam, New Order Era, and Reformation Era*

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang korelasi antara politik Islam pada masa Orde Baru dan Reformasi, bagaimana pergerakan Islam pada perpolitikan di Indonesia, serta bagaimana kedua konsep politik tersebut saling mempengaruhi dan berkontribusi terhadap perkembangan dan pertumbuhan negara meskipun terjadi pergolakan politik di masa transisi yaitu politik di masa Orde Baru menuju masa Reformasi. Sedangkan Islam terlebih dahulu mengajarkan tentang politik sebagai sebuah disiplin ilmu yaitu ilmu *siyasah* yang terdiri dari konsep dan prinsip politik dalam Islam seperti *Siyasah Dusturiyyah*, *Siyasah Dauliyyah*, *Siyasah Maliyyah*, *Siyasah Amiriyah*, *Siyasah Khalifah*, dan *Siyasah Imamah*. Secara garis besar politik Islam sangat besar pergerakannya di Indonesia, namun jika dihadapkan dengan politik pemerintah, politik Islam tidak mampu mendominasi pergerakan di panggung perpolitikan di Indonesia, meskipun demikian sebagian dari nilai-nilai Islam bisa ditanamkan pada pembangunan negeri, walaupun dalam skala kecil sebagai cerminan bahwa mayoritas penduduk Islam beragama Islam yang selalu kebersamai perpolitikan di Indonesia dari masa ke masa.

Kata kunci: Politik, Islam, Orde Baru, dan Reformasi

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



A. Pendahuluan

1. Latar Belakang Masalah

Lahirnya negara Indonesia berawal dari menguatnya politik Islam. Perkembangan politik Islam di masa orde baru dan reformasi menjadi tulang punggung pertumbuhan negara. Namun pakta sejarah menjelaskan bahwa perkembangan tersebut mengalami gejolak yang berdampak kepada keamanan, kesejahteraan rakyat Indonesia, karena pada masa orde baru terjadi huru hara politik kemudian berimplikasi pada masa reformasi. Begitu juga korelasi politik Islam pada masa orde lama dan orde baru, baik di era kemerdekaan maupun pasca kemerdekaan sangat masif terhadap perpolitikan di Indonesia. Oleh karena itu perlu perumusan masalah untuk mengetahui secara mendalam Bagaimana politik Islam pada masa orde baru, Bagaimana politik Islam pada masa reformasi dan Bagaimana korelasi politik Islam pada masa orde baru dan masa reformasi. Penelitian ini menggunakan metode studi kombinasi yang menggabungkan penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Kemudian terjadi transisi dari masa orde baru dan masa reformasi bagaimana dinamika politik Islam pada masa tersebut. Untuk mengkaji lebih jauh dan penyajian data penulis menggunakan studi pustaka seperti, artikel jurnal, buku, dan sumber lainnya. Adapun metode penulisan yang digunakan secara deskriptif, historis, teoritis, dan interdisipliner.

2. Rumusan Masalah

Bedasarkan latarbelakang masalah, maka ada beberapa hal yang menjadi rumusan penting untuk dibahas pada tulisan ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimana politik Islam pada masa orde baru?
- b. Bagaimana politik Islam pada masa reformasi?
- c. Bagaimana korelasi politik Islam pada masa orde baru dan masa reformasi?

3. Metode Penulisan

Pengumpulan bahan penelitian ini menggunakan studi pustaka (*library research*) seperti buku, artikel, dan sumber lainnya yang terkait dengan topik ini. Sedangkan metode penulisannya dengan cara sebagai berikut:

- a. Deskriptif: menjelaskan sistem politik hukum Islam yang digunakan oleh umat Islam dan bagaimana mereka berubah dengan waktu dan situasi.
- b. Historis: mengumpulkan dan menganalisis bukti-bukti sejarah untuk menjelaskan perkembangan politik hukum Islam.
- c. Teoretisasi: menyajikan pendapat-pendapat tentang politik hukum Islam, termasuk pandangan-pandangan yang berbeda tentang politik Islam atau *fiqh siyasah*.
- d. Interdisiplin: menggunakan ilmu-ilmu seperti sosiologi, antropologi, sejarah, ilmu politik, ilmu ekonomi, dan lainnya yang dipandang relevan untuk memahami hukum Islam dan politik yang terkait.

Pendahuluan memuat dasar pemikiran atau latar belakang masalah, rumusan masalah, dan metode penulisan.

Isi penelitian atau pembahasan memuat pengertian dan ruang lingkup politik Islam pada masa orde baru; politik Islam pada masa reformasi, korelasi politik Islam pada masa orde baru dan masa reformasi. Pada bagian penutup memuat kesimpulan dan daftar pustaka atau referensi dalam penulisan penelitian.

4. Telaah literatur (Literature Review)

Penelitian ini berjudul: "**Politik Islam pada Masa Orde Baru dan Masa Reformasi**". Agar pembahasan lebih fokus, maka perlu dibuat definisi operasional terhadap tema yang ditulis, yaitu:

- a. Politik adalah unsur yang urgen pada kehidupan manusia yang berpengaruh pada tatanan kehidupan sosial ekonomi, budaya dan masyarakat. Sedangkan Islam adalah agama yang memiliki ajaran yang komprehensif pada pembahasannya. Adapun politik Islam adalah sebuah disiplin ilmu tersendiri yang dikenal dengan ilmu *siyasah* yang terdiri dari konsep dan prinsip politik dalam Islam seperti *Siyasah Dusturiyyah* yaitu politik yang mengatur hubungan warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara yang lain dalam batas-batas administrasi suatu negara. 2. *Siyasah Dauliyyah* yaitu politik yang mengatur antara warga negara dengan lembaga negara dari negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara dari negara lain. 3. *Siyasah Maliyyah* ialah politik yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran uang milik negara. 4. *Siyasah Amiriyah* yaitu sistem kepemimpinan yang meliputi penguasa, pemimpin, komandan, dan Raja, 5. *Siyasah Khalifah*: yang berisi tentang sistem kepemimpinan yang meliputi penguasa, pemimpin, komandan, dan Raja, yang terdiri dari kriteria-kriteria sebagai pra-syarat untuk memilih seorang pemimpin. *Siyasah Imamah*: yang berisi tentang sistem kepemimpinan yang meliputi penguasa,

- pemimpin, komandan, dan Raja, yang terdiri dari kriteria-kriteria sebagai prasyarat untuk memilih seorang pemimpin.¹
- b. Masa Orde Baru adalah sebutan pada masa pemerintahan Presiden kedua Indonesia, Soeharto, yang menggantikan Orde Lama presiden sebelumnya, Soekarno. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan praktik korupsi yang merajalela dan pengekangan kebebasan berpendapat.
 - c. Masa Reformasi adalah di Indonesia disebut juga sebagai era pasca-Soeharto yang dimulai pada tahun 1998, ketika Presiden Soeharto mengakhiri kekuasaan 32 tahun Soeharto dengan mengundurkan diri dan melepas jabatannya pada 21 Mei 1998 kemudian digantikan oleh Wakil Presiden BJ Habibie.

B. Pembahasan

1. Ruang Lingkup Politik Islam Masa Orde Baru

a. Politik Islam Masa Orde Baru

Selama era Orde Baru, kebijakan Islamis di Indonesia mulai ditentang, seperti yang dikatakan Muhammad Natsir mengutip perkataan Ruth Mc Vey: *"They have treated us like cats with ring worm"* "Mereka memperlakukan kami seperti kucing-kucing kurap". secara harfiah berarti "mereka memperlakukan kita seperti itu". kucing-kucing kurap" - ini terdengar menyakitkan. Muhammad Natsir adalah tokoh demokrasi Indonesia yang langsung menyerukan ketegasan Indonesia dalam nilai-nilai demokrasi, setelah Soekarno menyerukan "demokrasi terpimpin", tokoh Indonesia yang turut andil dalam lahirnya "Islam politik" di dunia ini. Di negara ini, kekuatan politik Muslim mulai melemah di bawah tekanan kuat dari rezim Orde Baru, yang memaksa politik Muslim untuk mengarahkan diri mereka ke arah yang relatif lebih netral dan berorientasi pada budaya mayoritas.²

Cita-cita masyarakat pada dekade 1980 hingga 1990 adalah tidak menjadikan aktivitas politik sebagai satu-satunya alat perjuangan mengabdikan pada Islam dengan segala makna yang diyakini dan dijalannya dalam hidup. Gerakan Islam pada saat itu sedang bergerak menuju ranah baru di mana Islam kultural lebih dominan dibandingkan Islam politik itu sendiri. Budayawan dan intelektual Islam Kuntwijoyo menjelaskan, "Hal ini dapat dirumuskan menjadi tiga subgerakan: gerakan intelektual, gerakan etis, dan gerakan estetika." Hal ini jelas merupakan gejala bentuk baru gerakan Islam masyarakat Indonesia pada

¹ Mustofa Hasan, *Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-Kaidah Fikih*, Madania Vol. XVIII, No. 1, Juni 2014 h.100

² Muh. Syamsuddin, Muh. Fatkhan, *Dinamika Islam Pada Masa Orde Baru*, jurnal Dakwah, Vol. XI No. 2, Juli-Desember 2010, h. 146

umumnya, dan tentunya kondisi kesejahteraan terkini.³

Sementara itu, pada tahun 1960, lahirlah tatanan baru, dan muncullah harapan akan adanya bangsa yang beradab di berbagai lapisan masyarakat.

Runtuhnya PKI dan afiliasinya, disertai intrik berbagai kelompok politik, yang ditandai dengan kekerasan politik, membuka “era baru” yang membawa janji-janji kepada masyarakat yang secara diametral menentang PKI. Ketika orde baru muncul, umat Islam pada umumnya optimis terhadap kebangkitan partai “Mashmi terlarang”, namun kenyataannya harapan mereka pupus oleh rezim yang semula mereka dukung. Pada saat yang sama, jika ditengok ke belakang, mungkin ada orang seperti Muhammad Hatta, mantan Wakil Presiden RI, bahkan pernah mengajukan pembentukan Partai Demokrasi Islam Indonesia (PDII) Sebagai wadah aspirasi umat Islam di era pemerintahan Orde Baru. Namun kedua harapan tersebut sirna seiring dengan proyek de-ideologi dan depolitisasi. Proyek ini begitu dahsyatnya sehingga seluruh kehidupan politik berada di bawah kendali pemerintah yang baru saja menggulingkan PKI. Menurut Ridwan Saidi, mulai ada reaksi keras terhadap organisasi dan partai politik yang disebut “Islam”. Sebab, niat politik pemerintah adalah menata kembali sistem kepartaian dan sistem politik warisan orde lama. Pemerintah berharap masa depan politik di era Orde Baru bebas dari konflik ideologi. Dan partai politik berorientasi pada platform, bukan berorientasi pada ideologi. Konsep inilah yang diterapkan dan dikembangkan oleh masa Orde Baru dengan menerapkan konsep massa mengambang, yaitu massa ketidakpastian yang memisahkan basis dan garis tindakan partai politik dengan massa nasional. Kecuali menjelang pemilu. Meskipun Golkar masih eksis dan mempunyai akses yang kuat melalui jalur birokrasi di pusat dan daerah serta dari negara tetangga sebagai pendukungnya.⁴

Era Orde Baru diawali dengan pembahasan prinsip-prinsip kebangsaan pada rapat Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), yang pembahasannya diawali dengan pembahasan Islam di Indonesia. Dunia Islam ingin menerapkan prinsip-prinsip Islam sebagai satu-satunya prinsip pemerintahan. Hal ini sangat masuk akal, karena perjuangan umat Islam adalah kekuatan terbesar dan paling mendesak untuk melakukan perlawanan dan kemerdekaan dari penjajah. Namun kelompok nasionalis mempunyai pandangan berbeda, dengan alasan bahwa non-Muslim juga mempunyai peran dalam membawa Indonesia lebih dekat menuju kemerdekaan. Oleh karena itu, kaum nasionalis mengajukan sila Pancasila sendiri yang harus memperhatikan non-Muslim dan juga memperhatikan keberagaman budaya

³ Muh. Syamsuddin, Muh. Fatkhan, *Dinamika Islam Pada Masa Orde Baru...*h.147

⁴ Muh. Syamsuddin, Muh. Fatkhan, *Dinamika Islam Pada Masa Orde Baru*, jurnal Dakwah, Vol. Xi No. 2, Juli-Desember 2010, h.149

bangsa.⁵

Jika kita mengingat kembali sejarah kolonial Jepang, ada keinginan untuk menetralsir potensi gerakan Islam. Dia menegaskan kembali posisi politiknya dengan membentuk shumubu (semacam kantor Departemen Agama) di ibu kota pada 1944 dan cabang-cabangnya di seluruh kepulauan Indonesia yang disebut shumuka. Dan seperti tokoh-tokoh kolonial lainnya yang tidak menginginkan kemerdekaan, Shumubu Jepang dikomandoi oleh Kolonel Khoiri milik Jepang sendiri, yang digantikan oleh Kolonel Hussein Jajadinrat yang kemudian diserahkan kepada K.H. Hasyim Asiari dan KH. Wahid Hasyim.⁶

Upaya Jepang untuk mencapai kemerdekaan Indonesia dilakukan melalui pembentukan BPUPKI (Dokuritsu Tyoosakai) yang beranggotakan 68 orang dan 15 orang mewakili aspirasi politik Islam. Mereka membahas dan merancang secara rinci bentuk pemerintahan, batas-batas negara, dasar filsafat nasional, dan hal-hal lain yang relevan dengan negara-negara anggota. Pernyataan tentang Islam dan politik di Indonesia pada masa Orde Baru awal tahun 1990-an. Banyak peneliti dan cendekiawan di Indonesia yang tertarik pada bidang ini, terutama mengingat fenomena pemilu sejak tahun 1992. Dalam fenomena pemilu ini, Islam menjadi kekuatan politik yang tidak bisa diabaikan oleh banyak partai politik. masa pasca kemerdekaan. Namun akar permasalahannya terletak pada politik Islam di era Orde Baru, yaitu bagaimana Islam dapat memajukan kepentingan politiknya sendiri dalam konteks kehidupan politik Indonesia dengan mengurangi risiko konflik baik di dalam maupun antar umat Islam bagaimana mengungkapkannya dengan tepat. Muslim dan kekuatan politik lainnya dikucilkan dari lingkungan sekuler, Kristen/Katolik, dan militer.⁷

b. Peran Umat Islam Masa Orde Baru

Respon umat Islam terhadap krisis yang terjadi di akhir masa orde lama adalah lahirnya era orde baru, suatu tatanan yang dicita-citakan oleh umat Islam khususnya negara dan politisi. Era Orde Baru akan menyaksikan dinamisme umat Islam dalam menghadapi bangsa yang baru terbentuk. Tentu saja banyak harapan dan impian yang digagalkan oleh berbagai faktor yang sudah ada sebelumnya, termasuk dari kalangan umat Islam sendiri. Saya berharap bab ini memberikan gambaran mengenai respon politik umat Islam terhadap gerakan Orde Baru di Indonesia.⁸

Hubungan Politik dan Hukum Islam di Indonesia: Umat Islam selalu berusaha memperjuangkan nilai-nilai dan ajaran Islam yang dimaknai sebagai

⁵ Muh. Syamsuddin, Muh. Fatkhan, *Dinamika Islam Pada Masa Orde Baru*,..... h. 139

⁶ Harry J. Benda, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit* (Daniel Dakidae) Pustaka Jaya. Jakarta. 1980. hal. 157-160

⁷ Afan Gaffar, *Islam dan Politik dalam Era Orde Baru*, UNISIA. NO. L/Tahunxm TRIWULAN VI • 1993 h. 70

⁸ Okrisal Eka Putra, *Hubungan Islam Dan Politik Masa Orde Baku*, Jurnal Dakwah, Vol.Ix No. 2, Juli-Desember 2008, h.185

hukum positif. Sejarah politik hukum di Indonesia berpedoman pada pemikiran bahwa politik hukum merupakan produk politik dalam arti negatif. Dinamika politik hukum Islam juga merupakan gejala naik turunnya politik Islam, yang sangat bergantung pada harmonisnya hubungan antara Islam dan negara. Bahkan, kita bisa melihat sepanjang sejarah orde baru terjadi tiga kali pasang surut hubungan Islam dan pemerintah, yang pada akhirnya mempengaruhi kebijakan hukum negara. Abdul Aziz Thaba menguraikan tiga jenis hubungan yang dialami umat Islam dan pemerintahan Orde Baru: masa permusuhan (1966-1981), masa saling mengkritik (1981-1985), dan terakhir masa akomodasi (1985).⁹

Secara teori, pemerintahan Orde Baru merupakan negara organik yang bersifat pluralistik. Indonesia dianggap sebagai negara organik, sehingga merupakan negara yang mempunyai kemandirian yang cukup besar dan tidak mencerminkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Negara berperan aktif dan selalu mengambil keputusan secara demokratis. Konsep negara “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat” tidak berlaku. Negara model ini akan berkembang menjadi negara totaliter. Mengenai makna orde baru, Presiden Soeharto mengatakan, “Yang dimaksud dengan orde baru adalah pengaturan kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan seluruh kehidupan bangsa, dan ini kita kaitkan dengan kemurnian penerapan Pancasila dan UUD 45. Sebelum munculnya orde baru, terdapat beberapa situasi politik yang terjadi di Indonesia. Ini juga merupakan pertanda lahirnya tatanan baru dengan enam ciri.:

- 1) Kegagalan sistem multipartai
- 2) Konflik politik berdasarkan ideologi partai dalam suasana sosial yang tidak sepenuhnya menghormati aturan permainan politik yang ada
- 3) Intervensi partai politik dalam birokrasi dan dominasi birokrasi yang menjadi alasan terjadinya perpecahan
- 4) Partai politik bergaya totaliter
- 5) Infiltrasi Partai Komunis ke dalam ABRI menimbulkan ketegangan di kalangan militer, dan interaksi politik di pedesaan didominasi oleh nilai-nilai primodial, orientasi “parokial”, dan bercirikan “patron”. Hubungan dengan pelanggan yang mengurangi kekompakan desa dan menimbulkan konflik.¹⁰

c. Kepemimpinan masa orde baru

Pada masa Orde Baru, Pancasila dan UUD 1945 mengangkat seorang panglima dan kepemimpinan menjadi sangat tersentralisasi. Jangan melakukan sesuatu dengan setengah hati. Perbuatan yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 dianggap makar. Era saat ini difokuskan pada pengembangan

⁹ Ruslan, Faryda. “Politik Hukum Islam Masa Orde Baru dan Produk Perundang-Undangannya”, Volume 10, Nomor 2, al Qisthâs; Jurnal Hukum dan Politik (2019), h. 63

¹⁰ Okrisal Eka Putra, *Hubungan Islam Dan Politik Masa Orde Baru*,186

zona ekonomi.¹¹

Perubahan politik pada periode ini lebih terfokus pada politik di bidang ekonomi dibandingkan bidang hukum. Situasi hukum semakin represif, misalnya dengan menguatnya pasal makar dalam KUHP dan berlakunya UU Anti Subversif tanggal 5 Juli 1969. Upaya menyampaikan pendapat dan menyampaikan aspirasi secara konstitusional dapat dengan mudah dilihat sebagai sebuah upaya. Melemahkan distorsi ideologi Pancasila dan kebijakan nasional. Kritik masyarakat terhadap pihak berwenang mencakup upaya untuk menumbangkan kekuasaan dan otoritas pemerintah yang sah. Bagaimanapun, masyarakat hidup di bawah tekanan dan kekangan rezim yang berkuasa.¹²

d. Peran Umat Islam Masa Orde Baru

Salah satu upaya Pemerintah Orde Baru adalah dengan turut serta dalam pengaturan jalannya kegiatan Dewan Takrim, melalui penerbitan surat keputusan Menteri Agama Republik Indonesia yang meminta agar Dewan Takrim tidak digunakan sebagai instrumen politik yang sebenarnya.

Nomor 44 Tahun 1978 tentang Penyelenggaraan Dakwah Keagamaan dan Ceramah Shuvu di Radio serta Petunjuk Menteri Agama Republik Indonesia. Nomor 5 Tahun 1981 tentang Pedoman Penyelenggaraan Dakwah/Khutbah/Ajaran Agama. Ini sebenarnya punya tujuan tersendiri. Tujuan pemerintah adalah untuk menekan kepentingan politik kelompok Islam yang saat itu sangat besar, hingga mengkritik kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan kepentingan umat Islam. Upaya pemerintah untuk mensosialisasikan kebijakan akan dilaksanakan sepanjang :

- 1) Mendekati umat Islam,
- 2) Membentuk organisasi yang mengakomodir aspirasi umat Islam, seperti ICMI, DKMI, KODI, dll,
- 3) Menghilangkan kebijakan-kebijakan yang dianggap merugikan kepentingan umat Islam
- 4) Menanggapi aspirasi umat Islam dengan pelarangan jilbab di sekolah, penghapusan SDSB, dll. Memasyarakatkan Islam dengan membangun masjid di daerah terpencil, mendirikan Bank Muamalat, mengirimkan dakwah ke daerah pendatang, dan lain sebagainya. Kebijakan pemerintah antara lain melakukan retrospeksi terhadap kinerja dakwah agar tidak menimbulkan ketidakpastian di masyarakat. Hal ini menimbulkan reaksi keras dari umat Islam, dan bahkan menimbulkan ketegangan antara

¹¹ Supriyadi & Sholihul Hadi, "Regulasi Wakaf di Indonesia Dari Masa Orde Lama Sampai Era Reformasi Dalam Tinjauan Politik Hukum", Volume 6, Nomor 2, ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf (2019), h. 208.

¹² Mugiyanto, "Hubungan Oligarki Kekuasaan Dengan Politik Hukum Penguasa", Volume 3, Issue 1, Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI) (Februari 2022), h. 19-20.

pemerintah dan umat Islam, terutama politisi Muslim.¹³

Pada tahun-tahun awal orde baru, posisi umat Islam dan pemerintah sempat berselisih, dan terjadi beberapa peristiwa seperti Peristiwa Tanjung Priok, Peristiwa Lampung, dan Bom Borobudur yang semakin menjauhkan hubungan keduanya. Sebab, sebagian besar orang yang dekat dengan Presiden Soeharto adalah non-Muslim dan para panglima militer masih dikuasai kelompok Islamofobia. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya umat Islam pada masa itu yang tidak menyekolahkan anaknya ke sekolah militer pada masa penjajahan. Oleh karena itu, masyarakat yang berpendidikan tinggi sebagian besar adalah non-Muslim. Pada awal tahun 1990-an, generasi demi generasi umat Islam baru mengenyam pendidikan tinggi baik di bidang akademik maupun sastra. Pertumbuhan dan perkembangan penduduk terpelajar dan intelektual merupakan salah satu perkembangan penting di lingkungan pelajar Islam pada masa Orde Baru. Perkembangan ini didorong oleh kebijakan pemerintah yang memberikan ruang lebih luas kepada masyarakat luas untuk mengisi sekolah. Keadaan ini sangat berbeda dengan kebijakan pendidikan pada masa pemerintahan kolonial. Pada masa kolonial, hanya anak-anak bangsawan, priyayi, dan mereka yang menganut agama Kristen/Katolik dan mendapat subsidi besar dari gereja yang berkesempatan mengenyam pendidikan.¹⁴

e. Partai Islam Di Masa Orde Baru

Munculnya partai politik di Indonesia dapat ditelusuri sejak masa penjajahan Belanda. Partai politik di Indonesia ini muncul seiring tumbuh dan berkembangnya gerakan nasional, mengantarkan era kebangkitan nasional. Partai politik pertama yang muncul pada masa penjajahan Belanda merupakan wujud kesadaran nasional yang semakin berkembang. Ketika mereka mendirikan organisasinya, seperti Budi Utomo dan Muhammadiyah, apakah mereka mempunyai tujuan sosial, prinsip politik/agama (seperti Persatuan Islam atau Partai Katolik) atau prinsip politik/sekuler (PNI dan PKI) menjadi persoalan penting. Permainan politik dan perannya dalam pergerakan nasional. Pola partai politik yang ada saat ini menunjukkan keberagaman, dan pola ini terus berlanjut dalam bentuk sistem multipartai pada masa kemerdekaan. Banyaknya jumlah partai politik tidak membantu terbentuknya pemerintahan yang stabil. Pemilihan parlemen tahun 1955 membawa penyederhanaan jumlah partai dalam arti jelas muncul empat partai besar: Mashmi, PNI, NU, dan PKI. Namun para pihak belum mampu menjalankan tugas dan fungsinya sesuai harapan. Terakhir, di era

¹³ Zaini Dahlan, *Kebijakan Pemerintah Orde Baru Terhadap Majelis Ta'lim (Studi Terhadap Penguasa Orde Baru Yang Memanfaatkan Pendidikan Untuk Kepentingan Politik)*, Al-Fatih: Jurnal Pendidikan Dan Keislaman, Vol. I. N0. 1 Januari–Juni 2018, H.123

¹⁴ Okrisal Eka Putra, *Hubungan Islam Dan Politik Masa Orde Baru*,....187

demokrasi dipimpin, kebebasan bergerak partai politik dibatasi.¹⁵

2. Ruang Lingkup Politik Islam Masa Reformasi

a. Politik Islam Masa Reformasi

Islam pertama kali masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan. Islam memiliki dua pola penerimaan: dari bawah ke atas dan dari atas ke bawah. 3 Para mubaligh Islam tiba dengan kapal layar dan berlabuh di pelabuhan Perlac bersama 100 mubaligh Arab, Persia, dan India yang dipimpin oleh kapten Khalifah. Mereka menyebarkan agamanya dengan memberikan ceramah di desa-desa dan menikah dengan penduduk setempat dan keluarga kerajaan. Dengan pendekatan raja, Islam berkembang pesat, dan kerajaan Islam tertua yang diketahui di Indonesia adalah Perlak, Samuri, dan Pasay. Diketahui pula Kerajaan Siak I (Riau) pernah menjadi Kerajaan Selat Malaka yang menguasai arus perdagangan antara India, Tiongkok, dan Singasari (Majapahit). Penyebaran agama Islam diperkirakan terjadi pada abad ke-12 Masehi. Terlihat reruntuhan Makam Butaken bergaya Islam (1128 M), Nizamuddin al-Kamil Loksomawe dari Dinasti Fatimiah, Mesir.¹⁶

b. Masa Kepemimpinan Presiden Baharuddin Jusuf Habibie pada masa reformasi

Pada tanggal 21 Mei 1998, Baharuddin Yusuf Habibi resmi dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia. Sebagai hasil dari perjuangan reformasi, pemerintahan Bapak B.J. Habibie membawa dua perubahan mendasar di Indonesia: demokratisasi dan desentralisasi. Selama demokrasi masih ada, tidak dapat dipungkiri akan diperlukannya ruang terbuka yang luas bagi partisipasi masyarakat. Dalam sistem politik demokratis, perumusan kebijakan publik memerlukan hal mendasar yang selama ini diabaikan: partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan. Pada sistem politik tertutup yang diperkenalkan oleh pemerintahan Orde Baru, proses pengambilan keputusan politik lebih berpihak pada kepentingan nasional, sedangkan pada sistem politik terbuka, proses politik lebih berpihak pada kepentingan nasional. Promosi reformasi secara umum.¹⁷

Dengan mundurnya Presiden Soeharto, perdebatan mengenai Islam dan negara Pancasila memasuki babak baru. Jika pada rezim sebelumnya Islam politik (kelompok yang menjadikan Islam sebagai ideologi perjuangan dan cita-cita politik) menjadi "sasaran utama" agenda deradikalisasi dan depolitisasi Islam, maka pada era pasca-Soeharto era "politik" memunculkan istilah

¹⁵ Arief Hidayat, *Perkembangan Partai Politik Pada Masa Orde Baru (1966 – 1998)*, Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi, Volume 17, Nomor 2, April 2018, h.156

¹⁶ Suwardi Muhammad Samiun, et.al., *Peranan Kerajaan Siak dalam Sejarah Nasional Indonesia* (Pekan Baru: Universitas Riau, 1970), h. 15

¹⁷ Abdul Rahman1*, Bahri2, Donald Qomaidiansyah Tungkagi, *Desakralisasi Partai Politik Islam Pada Awal Reformasi Di Indonesia*, Candrasangkala: Jurnal Pendidikan Dan Sejarah Vol. 8 No. 1 Tahun 2022 h.50

“revivalisme Islam”. baik dalam bentuk partai politik maupun gerakan sosial keagamaan. Kebangkitan ini disusul dengan perjuangan mewujudkan ideologi politik mereka, negara syariah. Hebatnya, kelompok politik Islam ini telah berhasil meratifikasi lebih dari 60 peraturan daerah yang terinspirasi dari Syariat Islam di berbagai kabupaten/kota di Indonesia dalam waktu sekitar 10 tahun. Upaya kelompok politik Islam dalam menerapkan syariat Islam di Indonesia dapat dilihat sebagai upaya melawan ideologi-ideologi yang dianggap menghambat penerapan syariat Islam di Indonesia. Pandangan ini didasarkan pada argumen kuantitatif bahwa Islam merupakan mayoritas penduduk Indonesia, dan oleh karena itu, sebagaimana terangkum dalam “tujuh kata” Piagam Jakarta, Penegakan hukum Islam diperlukan. Argumen ini seolah mengabaikan realitas empiris masyarakat Indonesia yang majemuk, dimana hidup berdampingan antara agama, suku, ras, dan golongan merupakan fenomena yang hidup. Selain itu, bahkan di kalangan umat Islam sendiri, pembahasan kuantitatif mengenai Islam politik cukup adil mayoritas umat Islam (diwakili oleh Muhammadiyah dan NU) hidup di bawah payung negara Pancasila. Islam vs Pancasila. Bagi ormas politik Islam : Pancasila.¹⁸

Reformasi disusul dengan bangkitnya gerakan-gerakan Islam politik pada masa Orde Baru yang menjadi korban langsung proyek depolitisasi Islam politik. Kebangkitannya ditandai dengan seruan perubahan Pasal 29 UUD 1945 yang mengatur kebebasan beragama. Dengan kata lain, pasal ini mengatur tentang penerapan bentuk Kafa bagi pemeluk hukum Islam. Di antara 42 partai Islam tersebut, hanya 20 partai yang bisa ikut Pemilu 1999. Sedangkan yang bisa masuk Senayan hanya 10 partai Islam atau berlandaskan nilai-nilai Islam. Dengan total suara sebesar 37.5%.⁸ Lalu pada 2004, Partai Islam hanya diwakili oleh Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Bulan Bintang yang panensuara sebesar 18%.¹⁹

Di saat rencana syariah semakin tidak populer, Muhammadiyah dan NU justru mengukuhkan Pancasila sebagai landasan bersama kehidupan berbangsa dan bernegara. Muhammadiyah dan NU melalui karakter awal kemerdekaannya mengakui bahwa seluruh sila Pancasila telah sesuai dengan ajaran Islam. Kelima sila Pancasila tersebut secara berurutan merupakan sila Syariat Islam: Al-Tawhid, Al-Musawa Bayna al-Nas, Al-Ittihad wa Al-Ukhwa, Al-Shura, dan Al-Ira. Oleh karena itu, Pancasila sama sekali tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Sebaliknya meragukan atau menolak Pancasila sama saja dengan meragukan atau menolak ajaran mulia Islam. Buya Shafi Maarif, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, menilai penerapan syariat Islam di Indonesia akan

¹⁸ Andar Nubowo, *Islam Dan Pancasila Di Era Reformasi: Sebuah Reorientasi Aksi*, Jurnal Keamanan Nasional Vol. I No. 1 2015, H.62

¹⁹ Lembaga Survei Indonesia, « *Prospek Islam Politik* », Oktober 2007

membahayakan heterogenitas Pancasila dan masyarakat Indonesia.²⁰

Selama masa reformasi tahun 1997, legitimasi pemerintah berada di bawah ancaman di Asia Tenggara (Krisis Moneter). Golkar terpilih sebagai presiden dari tahun 1998 hingga 2003, dan rencana reformasi pun muncul diantaranya sebagai berikut:

- 1) Adili Suharto
- 2) Amandemen UUD 1945
- 3) Penghapusan dwifungsi Abri
- 4) Otonomi daerah semaksimal mungkin
- 5) Supremasi hukum (penegakan)
- 6) Pemerintahan bebas korupsi, kolusi dan Nepotisme

3. Korelasi Politik Islam Pada Masa Orde Baru dan Masa Reformasi

a. Masa transisi politik Islam masa orde baru dan reformasi

Pada masa proses transisi politik antara rezim Orde Baru dan rezim Reformasi, dilakukan upaya-upaya untuk mengubah strategi pembangunan antara kedua rezim tersebut. Selama 32 tahun, di bawah rezim Orde Baru yang dipimpin Presiden Soeharto, pemerintahan Orde Baru memilih strategi pembangunan sayap kanan yang represif dan meminimalkan peran masyarakat untuk mempertahankan kekuasaannya. Di sisi lain, di era reformasi, kami bertujuan untuk mengubah strategi pembangunan ke undang-undang yang sesuai yang memperluas partisipasi sektor publik dan swasta melalui amandemen konstitusi, membentuk segitiga integrasi dengan pemerintah sebagai pemangku kepentingan, dan mewujudkan hak asasi manusia dan cita-cita demokrasi. Oleh karena itu, karena reformasi konstitusi sangat penting dalam masa transisi politik, maka perubahan teknologi patut mendapat perhatian, mengingat transisi yang terjadi pada masa reformasi merupakan bentuk transisi yang luar biasa..²¹

Terkait dengan situasi yang terjadi di Indonesia pada masa peralihan dari masa Orde Baru ke masa reformasi, terjadi perkembangan hukum di Indonesia yang sebagian besar sejalan dengan pandangan teoritis Phillippe Nonet dan Philip Selznick. Era Orde Baru menunjukkan sisi represif, kebijakan yang diusung pemerintah mengabaikan kepentingan rakyat dan mengutamakan perlindungan kekuasaan. Gerakan reformasi kemudian menandai upaya mengubah konstitusi untuk mencegah pemerintahan yang menindas di masa depan. Selain itu, konstitusi ditetapkan untuk memungkinkan Indonesia menerapkan undang-undang yang sesuai, dan amandemen yang dilakukan juga

²⁰ Ahmad Syafii Ma'arif, « *Demi Keutuhan Bangsa* », Republika, 11 Juli 2006

²¹ Fikrotul Jadidah, *Perubahan Konstitusi Dalam Transisi Orde Baru Menuju Reformasi Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Mandala Education, Vol. 6. No. 1. April 2020, h.53

memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam komunitas lokal melalui penegasan hak konstitusional mereka, yang mana Indonesia sangat ingin melindunginya. Melindungi diri dari penindasan dalam kerangka hukum era reformasi.²²

b. Islam Sebagai Ideologi Terhadap Partai-Partai

Islam sebagai ideologi partai Islam pada dasarnya tidak ada perbedaan antara partai Islam yang satu dengan partai Islam lainnya. Begitu pula dengan nilai-nilai keagamaan, khususnya konsep Amar Ma'ruf Nahi Munkar dan Rahmatan Lil' Alamin yang diambil dari ajaran Islam PAN dan PKB, pada dasarnya adalah nilai-nilai kedua parpol Islam di atas perbedaan. Yang membedakan hanyalah tegaknya prinsip Pancasila, nasionalisme, pluralisme, dan keterbukaan di PAN dan PKB. Di sisi lain, PDIP dan Partai Demokrat pada dasarnya lahir dari ideologi yang sama, yaitu nasionalisme. Namun, jika memaknai nasionalisme sebagai ideologi, Partai Demokrat dan PDIP punya pandangan berbeda. Menurut Partai Demokrat, semangat nasionalisme diartikan tidak membeda-bedakan ras, suku, bangsa, jenis kelamin, profesi, agama, atau kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sementara itu, PDIP berpendapat bahwa nasionalisme dikaitkan dengan ketajaman kebangsaan sebagai pencetus rasa memiliki terhadap bangsa dan negara, dan harus dijaga kelestariannya. Fondasi nasionalisme yang diasosiasikan dengan PDI dan kemudian diusung oleh PDIP diambil dari konsep Margenis yang dianut oleh kebangkitan PNI pada tahun 1927 yang merupakan cikal bakal ideologi nasionalis PDIP. Berdasarkan ideologi nasionalisme-marhaenisme tersebut, PDIP mengambil identitas sebagai Partai Rakyat.²³

C. Kesimpulan

Aspirasi umat pada dekade 1980 hingga 1990 tidak menganggap aktivitas politik sebagai satu-satunya alat perjuangan dalam mengabdikan pada Islam, dengan segala makna yang diyakini dan dijalani dalam kehidupan. Gerakan Islam pada saat itu sedang bergerak menuju ranah baru "Islam sebagai gerakan budaya," yang lebih dominan secara budaya dibandingkan politik Islam itu sendiri."

Pada masa proses transisi politik antara rezim Orde Baru dan rezim Reformasi, dilakukan upaya-upaya untuk mengubah strategi pembangunan antara kedua rezim tersebut. Selama 32 tahun, di bawah rezim Orde Baru yang dipimpin Presiden Soeharto, pemerintahan Orde Baru memilih strategi pembangunan sayap kanan yang represif dan meminimalkan peran masyarakat untuk mempertahankan kekuasaannya. Di sisi lain, di era reformasi, kami bertujuan untuk mengubah strategi pembangunan ke undang-undang yang

²² Philippe Nonet dan Philip Selznick diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien. *Hukum Responsif*. Bandung: Nusamedia, 2013.

²³ Lili Romli, *Reformasi Partai Politik Dan Sistem Kepartaian Di Indonesia*, Politica Vol. 2, No. 2, November 2011 h. 205

sesuai yang memperluas partisipasi sektor publik dan swasta melalui amandemen konstitusi, membentuk segitiga integrasi dengan pemerintah sebagai pemangku kepentingan, dan mewujudkan hak asasi manusia.

Pada masa transisi dari era Orde Baru menuju reformasi, Indonesia menyaksikan perkembangan hukum yang secara umum sejalan dengan perspektif teoritis Philippe Nonet dan Philippe Selznick. Era Orde Baru menunjukkan sisi represif, kebijakan yang diusung pemerintah mengabaikan kepentingan rakyat dan mengutamakan perlindungan kekuasaan. Gerakan reformasi kemudian menandai upaya mengubah konstitusi untuk mencegah pemerintahan yang menindas di masa depan. Selain itu, konstitusi ditetapkan untuk memungkinkan Indonesia menerapkan undang-undang yang sesuai, dan amandemen yang dilakukan juga memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam komunitas lokal melalui penegakan hak konstitusional mereka, yang mana Indonesia sangat ingin melindunginya. Melindungi diri dari penindasan dalam kerangka hukum era reformasi.

D. Daftar Pustaka

- Benda, Harry J., *Bulan Sabit dan Matahari Terbit (Daniel Dakidae)* Pustaka Jaya. Jakarta. 1980.
- Dahlan, Zaini, *Kebijakan Pemerintah Orde Baru Terhadap Majelis Ta'lim (Studi Terhadap Penguasa Orde Baru Yang Memanfaatkan Pendidikan Untuk Kepentingan Politik)*, Al-Fatih: Jurnal Pendidikan Dan Keislaman, Vol. I. N0. 1 Januari–Juni 2018.
- Faryda.Ruslan, “Politik Hukum Islam Masa Orde Baru dan Produk Perundang-Undangannya”, Volume 10, Nomor 2, al Qisthâs; Jurnal Hukum dan Politik (2019).
- Gaffar, Afan, *Islam dan Politik dalam Era Orde Baru*, UNISIA. NO. L/Tahunxm TRIWULAN VI • 1993.
- Hasan,Mustofa, *Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-Kaidah Fikih*, Madania Vol. Xviii, No. 1, Juni 2014.
- Hidayat , Arief, *Perkembangan Partai Politik Pada Masa Orde Baru (1966 – 1998)*, Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi, Volume 17, Nomor 2, April 2018.
- Jadidah, Fikrotul, *Perubahan Konstitusi Dalam Transisi Orde Baru Menuju Reformasi Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Mandala Education, Vol. 6. No. 1. April 2020.
- Lembaga Survei Indonesia, « *Prospek Islam Politik* », Oktober 2007.
- Ma'arif, Ahmad Syafii, « *Demi Keutuhan Bangsa* », Republika, 11 Juli 2006
- Mugiyanto, “*Hubungan Oligarki Kekuasaan Dengan Politik Hukum Penguasa*”, Volume 3, Issue 1, Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI) (Februari 2022).
- Nonet, Philippe dan Selznick, Philip diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien. *Hukum Responsif*. Bandung: Nusamedia, 2013.
- Nubowo, Andar, *Islam Dan Pancasila Di Era Reformasi: Sebuah Reorientasi Aksi*, Jurnal Keamanan Nasional Vol. I No. 1 2015.
- Rahman, Abdul, Bahri², Donald Qomaidiansyah Tungkagi, *Desakralisasi Partai Politik Islam Pada Awal Reformasi Di Indonesia*, Candrasangkala: Jurnal Pendidikan Dan Sejarah Vol. 8 No. 1 Tahun 2022.
- Romli, Lili, *Reformasi Partai Politik Dan Sistem Kepartaian Di Indonesia*, Politica Vol. 2, No. 2, November 2011.

Samiun, Suwardi Muhammad, et.al., *Peranan Kerajaan Siak dalam Sejarah Nasional Indonesia* (Pekan Baru: Universitas Riau, 1970).

Syamsuddin, Muh., Fatkhan, Muh, *Dinamika Islam Pada Masa Orde Baru*, jurnal Dakwah, Vol. Xi No. 2, Juli-Desember 2010.

Supriyadi & Hadi, Sholihul "*Regulasi Wakaf di Indonesia Dari Masa Orde Lama Sampai Era Reformasi Dalam Tinjauan Politik Hukum*", Volume 6, Nomor 2, ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf (2019).

Putra, Okrisal Eka, *Hubungan Islam Dan Politik Masa Orde Baku*, Jurnal Dakwah, Vol.Ix No. 2, Juli-Desember 2008.